

AFD DAN INDONESIA

Kemitraan untuk Iklim



INDONESIA, SEBUAH NEGARA BERKEMBANG

Indonesia, negara berkembang yang berpenduduk 240 juta jiwa, merupakan sebuah kepulauan besar yang terdiri dari 18.000 pulau (datarannya diperkirakan seluas 1,9 juta km²). Negara Indonesia telah mengokohkan sistem demokrasi, dan kembali ke jalur pertumbuhan (6,3% di tahun 2007 dan 6,1% di tahun 2008) dan mampu bertahan terhadap krisis global baru-baru ini.



Indonesia berada di ranking ketiga di dunia sebagai penghasil emisi gas rumah kaca (GRK), setelah Cina dan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh penebangan hutan yang mencapai 85% dari seluruh emisi CO₂. Indonesia juga amat rentan terhadap gangguan iklim akibat kondisi geografis dan kemiskinan penduduknya.

Sektor energi Indonesia sangat bergantung pada sumber daya fosil alam yang melimpah di kepulauan ini; selain itu juga masih memiliki potensi besar atas energi terbarukan, terutama energi panas bumi (27 GW, yaitu hampir 40% dari cadangan dunia).

Akhirnya, Indonesia – bersama dengan Brasil – merupakan salah satu negara terkaya di dunia didalam hal keanekaragaman hayati baik di daratan maupun lautan. Kekayaan ini sedang terancam akibat penebangan hutan dan perubahan iklim.



© AFD – Morgane Leterrier

MANDAT AFD TERFOKUS PADA PERUBAHAN IKLIM

AFD baru memulai kegiatannya di Indonesia dengan membuka perwakilan misi di Jakarta pada pertengahan 2007.

Seperti di negara berkembang lainnya (Cina, India, Pakistan dan Brasil), AFD beroperasi di Indonesia dalam kerangka mandatnya yang berfokus pada perlindungan “Barang Publik Global” yaitu:

- Memerangi perubahan iklim, terutama dengan meningkatkan efisiensi energi dan pengembangan energi terbarukan,
- Melestarikan keanekaragaman hayati,
- Memerangi penyakit baru dan menular.



Tanaman padi di Jawa © Christel Le Goff

KEBIJAKAN SUKARELA MEMERANGI PERUBAHAN IKLIM

- **1994/2004:** Indonesia meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyoto;
- **Desember 2007:** Bali menjadi tuan rumah Konferensi Para Pihak Ke-13 (COP 13) UNFCCC ; Indonesia mengambil kesempatan itu dengan meluncurkan "*Rencana Aksi Nasional untuk Menanggulangi Perubahan Iklim*";
- **Juli 2008:** penerbitan dokumen "*Perencanaan Pembangunan Nasional: Tanggapan Indonesia terhadap Perubahan Iklim*", yang mengintegrasikan isu perubahan iklim kedalam proses pembangunan nasional Indonesia dan memasukkan Matriks Kebijakan (lebih dikenal sebagai "*Policy Matrix*") untuk aksi. Hal ini menjadi dasar bagi *Dana Pinjaman untuk Program Perubahan Iklim*.



© AFD – Thierry Liabastre

Meskipun Indonesia merupakan negara "non-Annex 1" berdasarkan Protokol Kyoto Protocol dan konsekwensinya adalah tidak berkewajiban untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya, namun Indonesia telah mantap menapaki jalur pembangunan yang rendah karbon, yang sejalan dengan konsep dasar UNFCCC tentang "tanggungjawab yang sama namun berbeda" didalam memerangi perubahan iklim.

Sebuah Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), yang terdiri dari 17 menteri dan dikepalai oleh Presiden, telah dibentuk pada bulan Juli 2008 untuk mengkoordinasikan rencana pemerintah dalam hal kebijakan-kebijakan untuk memerangi perubahan iklim dan menentukan posisi Indonesia didalam negosiasi-negosiasi tingkat internasional. DNPI telah memiliki sebuah *greenhouse gas abatement cost curve* yang ditetapkan untuk Indonesia sebagai dasar bagi pembuatan kebijakan oleh pemegang kekuasaan, dengan mengumpulkan data dan menganalisa scenario-skenario alternatif.

Pada 25 September 2009 di Pertemuan Tingkat Tinggi G20 di Pittsburgh, Presiden Indonesia mengumumkan keinginan Indonesia untuk mengurangi emisi hingga antara 26% dan 41% pada 2020 (tergantung pada jumlah bantuan dari negara berkembang) dari bisnis seperti skenario biasanya.



© AFD – Martha Stein-Sochras

BANTUAN AFD PADA KEBIJAKAN IKLIM INDONESIA

➤ 1 – Climate Change Program Loan (CCPL)

Climate Change Program Loan (CCPL / Dana Pinjaman Program Perubahan Iklim) merupakan program tiga tahun (2007-2009) yang dirancang oleh Pemerintah Indonesia yang berkonsultasi dengan lembaga donor Jepang dan Prancis. Tujuannya adalah membuat kebijakan publik yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Aksi dan indikator, yang dijabarkan dalam "*Policy Matrix*", ditinjau ulang setiap tahun oleh Pemerintah Indonesia dan lembaga donor. Aksi dan indikator tersebut dibagi dalam tiga kategori:

- Mitigasi perubahan iklim, pengurangan gas rumah kaca (kehutanan, energi dan industri);
- Adaptasi perubahan iklim (air dan pertanian);
- Isu lintas sektoral (Mekanisme Pembangunan yang Bersih, dll.).

"*Policy Matrix*" memuat reformasi dan kebijakan publik yang diimplementasi oleh pemerintah untuk memerangi perubahann iklim: penerbitan undang-undang dan keputusan, peluncuran proyek percontohan, penetapan Rencana Induk, dll.

Didalam kerangka kerja CCPL, AFD telah memberikan dua pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia, sebesar masing-masing 200 juta dolar AS di tahun 2008 dan 300 juta dolar AS di 2009, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memerangi perubahan iklim. Keduanya sama dengan dua tahap pertama program ini yang didanai bersama oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Pinjaman lunak jangka panjang ini telah seluruhnya disalurkan kedalam APBN.

2 – Bantuan teknis dan tenaga ahli sasaran

Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan khusus untuk memerangi perubahan iklim, AFD akan membiayai – dari anggarannya- tenaga ahli sasaran untuk mendukung:

- **Departemen Perindustrian:** kajian untuk pelaksanaan rencana mengurangi emisi gas rumah kaca didalam industri semen;
- **Departemen Kehutanan:** studi kelayakan atas pasar karbon hijau berskala kecil untuk memberikan akses perkebunan hutan skala kecil terhadap pasar karbon sukarela; penyusunan perangkat pengambilan keputusan untuk perencanaan tata guna lahan;
- **Dewan Nasional Perubahan Iklim:** kontribusi untuk tahap kedua kajian *greenhouse gas abatement cost curve Indonesia*.

Dalam kerangka kerja CCPL, AFD juga akan membiayai tenaga ahli kehutanan (dibawah kontrak dengan Pusat Kajian Prancis CIRAD), yang merupakan anggota tim supervise yang bertanggungjawab memantau kemajuan implementasi “*Policy Matrix*” dan mempersiapkan pertemuan-pertemuan Komite Pengarah CCPL.



Pusat panas bumi © PGE

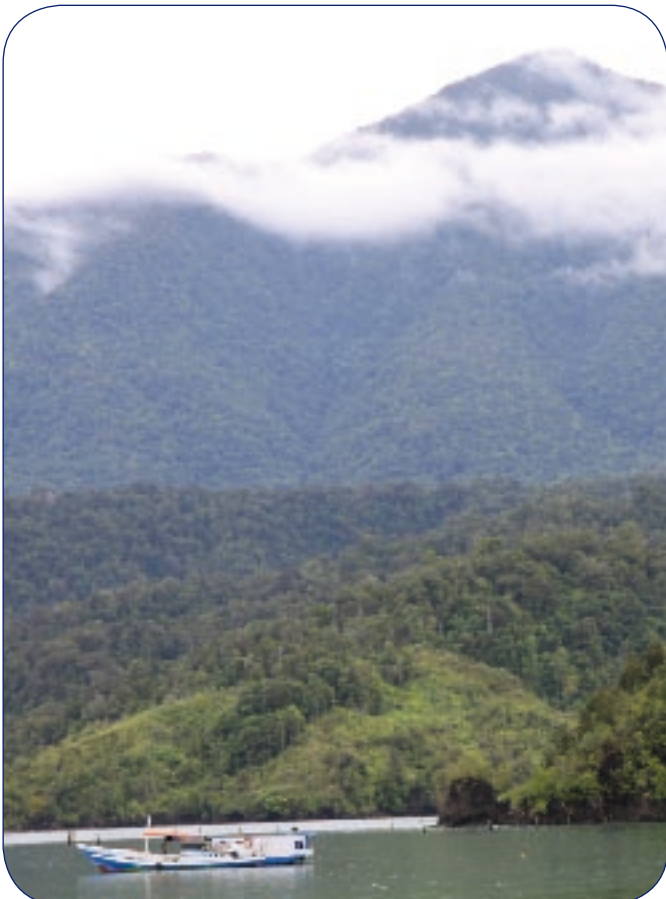
3 – Membiayai badan usaha negeri dan swasta

Selain membantu Pemerintah Indonesia, AFD mungkin juga mengalokasikan dana untuk perusahaan milik negara dan swasta, baik secara langsung ataupun melalui bank setempat.

Dibawah mandate ini, mitra utama potensial AFD merupakan perusahaan-perusahaan sektor energi (kelistrikan, gas, energi panas bumi, dll). Meskipun Indonesia memiliki potensi panas bumi tertinggi di dunia, Indonesia umumnya masih menggunakan sumber daya fosil – batu bara dan minyak- untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan AFD adalah membantu para investor untuk meningkatkan produksi dan menggunakan energi yang rendah karbon.

Dalam bidang kelistrikan, di akhir bulan September 2009 AFD memberi pinjaman sebesar 50 juta dolar AS kepada Pemerintah Indonesia (dalam pembiayaan bersama dengan Bank Pembangunan Asia) yang akan direalokasi kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebagai penyedia listrik publik, untuk merehabilitasi jaringan distribusi listrik di Jawa dan Bali. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi dari jaringan ini dengan mengurangi kerugian usaha dan, pada gilirannya, pengurangan emisi CO₂.

AFD juga telah mengalokasi pinjaman kredit sebesar 100 juta dolar AS untuk bank lokal terbesar untuk membiayai ulang proyek-proyek “Barang Publik Global”, terutama proyek efisiensi energi dan energi terbarukan, serta proyek-proyek untuk meningkatkan sumberdaya energi yang membuang sedikit CO₂. AFD berencana membiaya bersama program pelatihan staf dengan bank tersebut untuk, topik-topik terkait pengelolaan energi berkelanjutan dan perubahan iklim.



PROPARCO DI INDONESIA

PROPARCO merupakan bagian AFD yang membiayai sektor swasta. Misinya adalah memberikan dana melalui beragam perangkat keuangan (pinjaman, investasi ekuitas, dll.) untuk membantu proyek-proyek yang berdampak positif bagi pembangunan dan lingkungan.

Di Indonesia, kegiatan PROPARCO berfokus pada pengelolaan “Barang Publik Global”, keuangan mikro, usaha pertanian, pendidikan dan kesehatan.



© Christel Le Goff

PASKA-TSUNAMI: PROYEK DRAINASE PERKOTAAN BANDA ACEH

Berdasarkan mandat khusus untuk upaya pembangunan paska tsunami, AFD telah mengalokasikan pinjaman yang sangat konsensional senilai 36,8 juta euro bagi Pemerintah untuk mendanai rehabilitasi sistem drainase perkotaan di Banda Aceh.

Proyek ini terutama menyediakan kegiatan rehabilitasi besar (perbaikan dan pembangunan saluran sejauh 150 km, pembangunan rumah pompa, pembuatan kolam penampungan) untuk infrastruktur primer dan sekunder di lima zona hidrolik di Banda Aceh yang mencakup 80% dari kawasan ini. Dengan menyeimbangkan anggaran untuk Rencana Induk drainase untuk seluruh Banda Aceh, pembiayaan AFD akan membantu rekonstruksi infrastruktur yang secara langsung hancur oleh tsunami dan juga membantu memberikan kondisi keamanan yang lebih baik di kawasan punggungan sehingga kota Banda Aceh akan mampu berkembang. 23 000 orang yang tertimpa banjir terus menerus akan secara langsung menerima manfaat dari pelaksanaan proyek ini.



© AFD – Morgane Leterrier



© AFD – Martha Stein-Sochas

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD)

5 rue Roland Barthes – 75598 Paris Cedex 12 – France
Tel: +33 1 53 44 31 31 – Fax: +33 1 44 87 99 39
www.afd.fr

INDONESIA RESIDENT MISSION

World Trade Center, 12th floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31 – Jakarta 12920 – INDONESIA
Tel: +62 21 2550 2300 – Fax: +62 21 2550 2323
afdjakarta@afd.fr – www.afd-indonesie.org

AFD merupakan singkatan dari Agence Française de Développement. AFD adalah suatu institusi keuangan untuk pembangunan yang bekerja melawan kemiskinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dan Wilayah Diluar Negeri Prancis selama lebih dari 60 tahun. AFD mengeksekusikan kebijakan Pemerintah Prancis untuk bantuan pembangunan.

Dengan keberadaan kantor di lebih 50 negara, AFD membiayai dan mendukung proyek-proyek yang dapat meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, memajukan pertumbuhan ekonomi dan melindungi planet. Proyek-proyek yang didanai AFD menyediakan sekolah untuk anak-anak, membantu para petani dan usaha kecil, memasokkan air minum, melestarikan hutan tropis dan melawan perubahan iklim, dan lain sebagainya.

AFD telah komit sekitar €4.5 milyar untuk membiayai aktifitas-aktifitas bantuan pada negara berkembang dan Wilayah Diluar Negeri Prancis pada 2008. Dana tersebut dapat membantu 7 juta anak untuk bersekolah, memberikan akses kepada 4.4 juta orang untuk mendapatkan air minum dan menciptakan atau menjaga pekerjaan untuk 370,000 karyawan yang berada pada perusahaan swasta; mendanai proyek-proyek sehingga dapat menyimpan 3.3 juta ton emisi karbon dioksida per tahun.



PROPARCO 

www.proparco.fr

Proparco merupakan Institusi Keuangan Pembangunan yang secara bersama dimiliki oleh Agence Française de Développement (AFD) dan pemegang saham publik/swasta dari Belahan Utara dan Selatan. Misinya adalah mendorong percepatan investasi swasta di negara berkembang dengan membantu pertumbuhan, pembangunan berkelanjutan dan mencapai Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs). Proparco dibentuk tigapuluh tahun lalu dengan keyakinan bahwa sektor swasta memiliki peran sangat penting didalam pembangunan. Modalnya meningkat tiga kali lipat pada 2008. PROPARGO membiayai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat secara ekonomis, berkeadilan sosial, berkelanjutan dari sisi lingkungan hidup dan menguntungkan dari sisi finansial. Proparco berinvestasi di suatu kawasan geografis yang mencakup negara-negara besar yang berkembang dan negara-negara termiskin. Afrika mendapat 55% dari seluruh kegiatannya. PROPARGO menyediakan beragam produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus para investor swasta di negara-negara berkembang. Di tahun 2008, PROPARGO mengalokasi 800 juta euro untuk lebih dari enam puluh proyek di lebih dari tiga puluh negara.



This brochure respects the environment and was printed using vegetal ink on FSC certified paper (sustainable forest management).

afd
AGENCE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT